

Edisi Cetak Lepas

Versi Digital

ISSN: 0852-8489

---

## Gerakan Dakwah Salafi di Indonesia pada Era Reformasi

Penulis: Dady Hidayat

Sumber: Jurnal Sosiologi MASYARAKAT, Vol. 17, No. 2, Juli 2012: 115-133

Dipublikasikan oleh: Pusat Kajian Sosiologi, LabSosio FISIP-UI.

---

**Jurnal Sosiologi MASYARAKAT** diterbitkan oleh *LabSosio*, Pusat Kajian Sosiologi Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia. Jurnal ini menjadi media informasi dan komunikasi dalam rangka pengembangan sosiologi di Indonesia. Redaksi MASYARAKAT mengundang para sosiolog, peminat sosiologi dan para mahasiswa sosiologi untuk berdiskusi dan menulis secara bebas dan kreatif demi pengembangan sosiologi di Indonesia. Email: [labsosio@ui.ac.id](mailto:labsosio@ui.ac.id) Website: [www.labsosio.org](http://www.labsosio.org)

Untuk mengutip artikel ini:

Hidayat, Dady. 2012. "Gerakan Dakwah Salafi di Indonesia pada Era Reformasi." *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT*, Vol. 17, No. 2, Juli 2012: 115-133.

# Gerakan Dakwah Salafi di Indonesia pada Era Reformasi

Dady Hidayat

Aktivis Yayasan Amal Sejahtera Insani, Jakarta Utara  
Email: dadyhidayatdoa@yahoo.com

## ***Abstract***

*This article examines the genesis and the expansion of salafi movements during reformation era. Using a social movement's perspective with three main factors on social movements; political opportunity structure, framing process, and resources mobilization theory, this research aims to reveal the factor of salafi movement's growing. The research is use a qualitative approach with a field research method, where the researchers directly observes to the people being studied and try to examine any subjective experiences in the sociological view. The results of this study reveal that the reformation era, gives some opportunity to salafi movements to be rapidly expanded. Their expanding is also supported by every social network they made, to gain resources and help the movements to do expanding of their activity.*

Kata kunci: struktur kesempatan politik, proses *framing*, mobilisasi, sumber daya, gerakan salafi, era reformasi

## PENDAHULUAN

Salah satu fase kontemporer yang paling menarik bagi perkembangan Islam di Indonesia adalah dasawarsa 1980 (1980-1990-an). Sepuluh tahun tersebut adalah masa yang memunculkan berbagai perkembangan baru atas dinamika Islam di Indonesia (Azra 1999:17). Perkembangan tersebut berkaitan dengan masuknya berbagai gerakan-gerakan Islam dari Timur tengah. Mereka membawa dan mengusung ide-ide mengenai kebangkitan Islam.

Salah satu kelompok gerakan Islam yang mulai muncul pada tahun 1980-an adalah kelompok yang disebut sebagai gerakan dakwah salafi. Gerakan ini mengusung ide yang disandarkan pada diskursus *salaf*. Secara bahasa, kata *salaf* memiliki arti “telah lalu”, sedangkan secara istilah *salaf* adalah “sifat yang dikhususkan kepada para shahabat (generasi awal Islam), dan juga selain mereka, ikut serta dalam makna ini yaitu orang-orang pada generasi selanjutnya yang mengikuti mereka” (Jawas 2008:14). Jadi, *salafi* berarti kata yang merujuk kepada pemikiran keagamaan yang disandarkan pada orang-orang pada periode awal Islam—yakni saat Nabi masih hidup—yang merupakan sumber paling otentik sebagai panduan Islam (Jahroni 2007:105).

Gerakan ini kemudian berkembang pesat terutama sejak lengsernya kepemimpinan Soeharto. Pertumbuhan salafi menandai kecenderungan baru dalam aktivisme Islam di Indonesia, meski memperlihatkan identitas yang berbeda dan ambisi untuk kembali kepada apa yang mereka sebut “Islam murni”, sebagaimana dipraktikkan oleh *salaf ash-shalih* (para pendahulu yang saleh). Mereka mengusung pendirian yang disebut “kesunyian apolitis” (Hasan 2008:32), yaitu pendirian yang mencurahkan perhatian sepenuhnya pada pemurnian tauhid dan beberapa isu lain yang berkaitan dengan pembaruan praktik keagamaan.

Pertumbuhan gerakan ini ditopang oleh keadaan politik pada era reformasi yang terbuka lebar, sehingga menjamin kebebasan berekspresi bagi individu maupun kelompok. Pada era ini, organisasi massa dari segala elemen mulai muncul, termasuk partai politik. Hasan (2008) mencatat fenomena reformasi menjadi momentum lahirnya organisasi-organisasi massa. Dan kebanyakan di antaranya berbasis Islam, seperti Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad,

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang gerakan dakwah salafi. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Belanawe (2008) berjudul “Identitas dan Pengonstruksianya dalam Komunitas Salafi Ahlussunnah wal Jamaah” Penelitian ini ingin menjawab permasalahan mengenai identitas salafi yang senantiasa menjaga otentitas budaya dalam masyarakat, seperti cara berpakaian yang masih mengikuti cara berpakaian Islam dengan *gamis* atau *burqa*. Menurut penelitian ini, upaya salafi dalam mempertahankan otentitas—versi mereka—adalah sebuah upaya untuk mencari keteraturan (*order*) dan ketenangan. Penelitian ini menggunakan analisis *discourse* dan kerangka Geertz dalam melihat persoalan budaya yang tak terlepas dari identitas kalangan salafi.

Kedua adalah penelitian Noorhaidi Hassan (2008) berjudul *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas Pasca Orde Baru*.<sup>1</sup> Hasan memberikan pemaparan secara sosiologis dengan menggunakan kerangka gerakan sosial mengenai kemunculan Laskar Jihad. Berawal dari pengaruh gerakan dakwah salafi yang ekspansinya didorong kuat oleh Arab Saudi, embrionya pun bertransformasi menjadi sebuah gerakan yang lebih terorganisasi (memiliki struktur kerja). Kalau gerakan dakwah salafi cenderung bersifat apolitis, Laskar Jihad merupakan bentuk transformasi salafi yang politis. Secara khusus, penelitian ini mengkaji peran tokoh sentral dalam Laskar Jihad, yaitu Ja’far Umar Thalib.

Penelitian pertama belum menggambarkan secara utuh bagaimana perkembangan salafi di Indonesia. Penelitian tersebut hanya memotret aspek identitas dan konstruksinya dalam otentitas budaya kalangan salafi. Sedangkan penelitian kedua sudah membahas bagaimana perkembangan salafi di Indonesia. Hanya saja ia terlalu berfokus pada sosok Ja’far Umar Thalib yang menjadi tokoh sentral dalam transformasi ideologi politis kalangan salafi. Ia kurang bisa memberikan jawaban mengapa salafi bisa berkembang pada era reformasi seperti sekarang ini.

Oleh sebab itu, penelitian ini mengambil posisi berbeda dari dua penelitian sebelumnya, yakni berfokus pada kerangka gerakan

---

1 Penelitian ini merupakan disertasi di Universitas Leiden yang telah diterbitkan dalam bentuk buku berjudul “Laskar Jihad: Islam, Militansi dan Pencarian Identitas Pasca Orde Baru”, edisi bahasa Indonesia, oleh LP3ES.

sosial yang mencoba melihat perkembangannya melalui tiga faktor, yaitu *political opportunity structures*, *framing process*, dan *resources mobilization*. Dengan ketiga faktor tersebut, penelitian ini mencoba melihat fenomena struktural yang memunculkan dan memberikan kesempatan kepada salafi untuk berkembang dan mendeskripsikan peran aktor dalam mengemas ideologi (*framing*) serta memobilisasi sumber daya yang dimiliki (*resources and mobilization*).

Menurut penulis, gerakan dakwah salafi berkembang cukup pesat terutama sejak reformasi bergulir di Indonesia. Keruntuhan rezim otoriter Soeharto menciptakan kondisi politik yang demokratis, sehingga membuka kesempatan bagi gerakan dakwah salafi untuk tampil dan muncul ke permukaan. Pada era ini, perkembangan salafi sangat terlihat mulai dari banyaknya pengajian-pengajian, pesantren-pesantren, dan buku-buku terbitan yang menyampaikan ide-ide salafi. Era reformasi merupakan sebuah bagian dari struktur kesempatan politik bagi gerakan dakwah salafi untuk muncul dan berkembang serta bisa dengan bebas menyebarkan pandangan-pandangannya kepada masyarakat.

Pandangan-pandangan yang disebarkan tersebut haruslah dikemas dengan baik. Keterbukaan sistem politik untuk bisa menyampaikan gagasan saja tidak cukup karena diperlukan adanya sebuah pengemasan nilai-nilai dan ideologi. Inilah sebuah proses yang dikenal sebagai *framing* dalam setiap gerakan sosial. Hal ini bertujuan agar segala pandangan dan ideologi gerakan dakwah salafi bisa diterima oleh para pengikutnya. Dan *framing* secara tidak langsung mendorong partisipasi orang untuk terlibat dalam aktivitas gerakan.

Selain itu, gerakan dakwah salafi juga mendapat dukungan sumber daya (*resources*) dari negara-negara di Kawasan Teluk, khususnya Arab Saudi. Hal ini disebabkan salafi tidak bisa dipisahkan dari kampanye global Arab Saudi yang sangat ambisius mendorong wahhabi-sasi umat Islam (Hasan 2008:32). Arab Saudi juga berkepentingan untuk mengantisipasi meluasnya pengaruh syi'ah pasca Revolusi Iran tahun 1979. Untuk itu, Arab Saudi melakukan beragam upaya menyebarkan ajaran wahhabi, di antaranya dengan memberikan bantuan pendidikan dan dana untuk pengembangan kegiatan dakwah salafi di Indonesia (Rahmat 2005:127).

## TEORI GERAKAN SOSIAL

Isu mengenai *social movements* atau gerakan sosial telah menjadi sebuah studi dari berbagai penelitian. Perkembangannya yang begitu cepat, terutama setelah mulai bermunculannya berbagai gerakan pada tahun 1960-an yang mengusung berbagai tujuan, menjadikan topik ini cukup menarik perhatian (Porta dan Diani 2006:1). Hal ini mengakibatkan hadirnya beragam perspektif yang berkembang dalam melihat kemunculan sebuah gerakan sosial.

Dalam satu dekade terakhir ini, perspektif gerakan sosial didominasi oleh pendekatan *political approach*. Pendekatan ini melihat gerakan sosial dalam kerangka *state-centeredness*, menjadikan negara sebagai target dari gerakan sosial, karena negaralah satu-satunya otoritas (*source of power*) (Armstrong dan Bernstein 2008:74). Pandangan ini menjadi dominan karena sejalan dengan perkembangannya, gerakan sosial yang bermunculan memang secara tidak langsung bersinggungan dengan kepentingan negara, misalnya gerakan buruh, gerakan mahasiswa, serta *civil rights and anti-war movements* (lihat Porta dan Diani 2006:1-2).

Namun, pandangan ini mendapatkan banyak kritikan, terutama sejak mulai berkembangnya apa yang disebut Tilly (1998) sebagai *new social movements*, yaitu gerakan-gerakan yang berbasis pada isu-isu seperti lingkungan, preferensi seksual, dan gender. Gerakan-gerakan tersebut tidak semata-mata menjadikan negara sebagai target, sehingga hadirlah berbagai definisi baru mengenai gerakan sosial. Salah satunya adalah yang dibawakan oleh Snow (2004:11), yang mengatakan:

“...*social movements can be thought of as collectivities acting with some degree of organization and continuity outside of institutional or organizational channels for the pure of challenging or defending extant authority, whether it is institutionally or culturally based, in the group, organization, society, culture, or world order of which they are apart.*”

Dari pernyataan itu, Snow mendefinisikan gerakan sosial sebagai gerakan kolektif yang terorganisasi dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk menentang otoritas yang ada, baik secara institusi maupun kultural. Penjelasan Snow menunjukkan bahwa negara bukanlah satu-satunya *source of power and authority*. Gerakan sosial tidak hanya

menjadikan negara sebagai targetnya, tetapi juga berbagai otoritas lain dari berbagai institusi dan *cultural meaning* yang menjadi bagian dari masyarakat. Bagi Snow (2011:9), gerakan sosial itu menentang apa yang disebut sebagai *institutional authority*—baik yang berada pada area politik seperti negara maupun yang lainnya seperti korporasi, agama atau dunia pendidikan—atau bentuk-bentuk *cultural authority* seperti sistem kepercayaan atau praktik dari sistem kepercayaan tersebut.

Definisi di atas merupakan definisi salah satu saja dari sekian banyak definisi yang ada mengenai gerakan sosial. Bahkan Opp (2009:36) menyebutkan perlunya suatu usaha yang lebih untuk mendefinisikan gerakan sosial, mengingat terlalu banyak pemikiran yang berkembang tentang hal itu.<sup>2</sup> Meski banyak definisi yang dibangun mengenai gerakan sosial, semuanya biasanya melingkupi karakter-karakter dari gerakan sosial secara umum, seperti tindakan kolektif, terorganisasi, memiliki kontinuitas, serta memiliki tujuan (*change-oriented goals or claims*) (Snow dkk 2004:6).

Para ahli memahami bahwa gerakan sosial merupakan gejala yang begitu kompleks. Pemahaman ini mengantarkan pentingnya pembahasan yang bersifat komprehensif dan integral antara *political opportunity structure* (SKP), *resources mobilization theory*, dan *collective action frames* (McAdam, McCarthy, dan Zald 1996:7). Ketiga hal tersebut merupakan faktor dari muncul dan berkembangnya suatu gerakan sosial.

*Political opportunity structure* (struktur kesempatan politik, SKP) merupakan sebuah konsep yang menyatakan bahwa kondisi struktur politik dalam hal tertentu memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan suatu gerakan sosial. Jadi, suatu gerakan sosial tergantung pada keadaan SKP itu sendiri. Dalam hal ini, SKP menjadi ruang multidimensi yang gerakan sosial dan tindakannya bisa saja dimudahkan (*facilitated*) atau bisa saja direpresi (dihambat), sehingga tak bisa berkembang (*repressed*) (Oliver 1998).

Secara umum, hambatan atau kesempatan politik bagi suatu gerakan sosial dapat dipilah ke dalam dua kategori: pola hubungan tertutup dan pola hubungan terbuka. Pola tertutup menciptakan hambatan bagi gerakan sosial, sedangkan pola terbuka membuka

---

2 Opp (2009:34-39) memetakan pendapat-pendapat para ahli yang berkembang dalam mendefinisikan apa itu “gerakan sosial” dan “protes”. Ia menukil lebih dari dua belas definisi yang menjelaskan mengenai karakter-karakter gerakan sosial.

kesempatan bagi munculnya gerakan akibat dari politik yang lebih kompetitif antara elite, antara partai politik, dan juga antara kelompok kepentingan. Semakin terbuka iklim politik, semakin memberikan kesempatan untuk muncul dan berkembangnya gerakan sosial; dan sebaliknya, semakin tertutup iklim politik, semakin tertutup kesempatan muncul dan berkembangnya suatu gerakan sosial<sup>3</sup> (Muhtadi 2001:10-11; lihat juga Kriesi 2004:70).

Kondisi struktural yang kondusif tidaklah cukup bagi perkembangan suatu gerakan sosial. Gerakan sosial juga memerlukan apa yang disebut sebagai bagian dari pengemasan ideologi untuk dapat diterima berbagai pihak. Inilah yang disebut *collective action frames* yang merupakan bagian dari sebuah proses *framing* dalam gerakan sosial, yakni semacam skema interpretasi yang merupakan sekumpulan *beliefs and meanings* dan berorientasi pada aksi yang menginspirasi dan melegitimasi aktivitas sebuah organisasi gerakan sosial. Dalam hal ini, kerangka (*frame*) dibangun untuk memberikan makna dan menginterpretasi kejadian atau kondisi tertentu, yang dimaksudkan untuk memobilisasi potensi pengikut, serta untuk mendapatkan dukungan berbagai pihak (Benford dan Snow 2000; Snow 2004).

Berkaitan dengan proses *framing*, Benford dan Snow (2000) menyebutkan tiga hal yang menjadi perhatian utama, yang disebut *core framing tasks*. Pertama adalah *diagnostic framing*, yaitu yang dikonstruksikan dalam sebuah gerakan sosial guna memberikan pemahaman mengenai situasi dan kondisi yang sifatnya problematik. Kondisi mengenai apa atau siapa yang disalahkan, sehingga membutuhkan adanya suatu perubahan (Benford dan Snow 2000:615). Dalam level ini, aktor-aktor gerakan sosial mendefinisikan permasalahan-permasalahan apa saja yang menjadi isu utama yang membuat mereka menginginkan adanya perubahan.

Kedua, *prognostic framing*, yaitu artikulasi solusi yang ditawarkan bagi persoalan-persoalan yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Dalam aktivitas *prognostic framing* ini gerakan sosial juga melakukan berbagai penyangkalan atau menjamin kemanjuran dari solusi-solusi yang ditawarkan (Benford dan Snow 2000). Terakhir adalah *motivational framing*, yaitu elaborasi panggilan untuk bergerak atau

---

3 Yang dimaksud sebagai iklim politik yang terbuka dan tertutup di sini adalah aksesibilitas sistem politik yang ada secara insituasional. Semakin mudah diakses suatu sistem politik maka semakin terbuka iklim politiknya dan sebaliknya (Kriesi 2004:69-72).

dasar untuk terlibat dalam usaha memperbaiki keadaan melalui tindakan kolektif.

Selanjutnya, setiap gerakan sosial tentunya membutuhkan sumber daya untuk bisa menjalankan aktivitas kolektifnya. Dalam hal ini, gerakan sosial memiliki beberapa tugas penting seperti memobilisasi pendukung, mengorganisasi sumber daya, yang—dalam level yang lebih jauh—berdampak pada munculnya simpati elite-elite dan masyarakat secara umum terhadap cita-cita gerakan. Inilah konsep yang disebut *resources mobilization* (lihat Opp 2009:128; Jenkins 1983:528). Konsep ini secara mendasar berusaha mengetahui bagaimana sebuah kelompok mengupayakan *resources* yang mereka miliki untuk bisa melakukan perubahan sosial dan tercapainya tujuan kelompok (Edwards dan McCarthy 2004:118). Konsep ini berusaha melihat dorongan upaya, baik secara kolektif maupun individual, yang muncul sebagai bagian dari pencapaian tujuan yang dimiliki oleh gerakan sosial.

*Resources* sendiri sebenarnya memiliki makna yang begitu luas. *Resources* dapat terdiri dari kekuatan finansial, akses terhadap media, dukungan simpatisan, loyalitas grup. Ia juga bisa terdiri dari kepemilikan ruang/gedung, pengetahuan (*stock of knowledge*), dan *skill* (keahlian) yang dimiliki oleh aktor (Opp 2009:139), termasuk di dalamnya ideologi dan nilai gerakan.

*Resources* adalah “*goods*” dalam terminologi ekonomi. Hanya saja hal itu dimaknai dalam arti yang lebih luas, yakni sesuatu yang memiliki nilai manfaat (*utility*). Tetapi tidak semua hal yang memiliki nilai manfaat bisa disebut sebagai *resources*. Hal itu baru bisa disebut sebagai *resources* ketika individu atau aktor kolektif bisa mengontrolnya dan memanfaatkannya guna tercapainya tujuan gerakan.

Kerangka *resources mobilization* ini menjelaskan dua aspek sekaligus. Pertama, mengenai sumberdaya fisik, non-fisik, ataupun finansial yang dimiliki oleh sebuah gerakan seperti bangunan, uang, pengetahuan, atau keahlian tertentu. Sumber daya tersebut bisa dikontrol baik secara individual maupun kolektif oleh kelompok. Kedua, mobilisasi merupakan suatu proses tak terpisahkan yang para aktornya berusaha memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan dari gerakan.

## REFORMASI SEBAGAI STRUKTUR KESEMPATAN POLITIK BAGI GERAKAN DAKWAH SALAFI

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, keadaan politik di Indonesia yang melahirkan reformasi membawa keterbukaan pada struktur dan sistem politik yang ada. Reformasi digambarkan sebagai ruang yang segala aktivitas politik dijamin kebebasannya. Pembentukan partai, serikat pekerja, organisasi massa, semua dijamin kebebasannya pada masa reformasi. Jaminan tersebut adalah bagian dari usaha untuk menciptakan struktur dan sistem politik yang terbuka.

Pada masa reformasi, seperti telah disebutkan sebelumnya, terbangun sistem politik yang terbuka (*open system*). Hal ini bisa dilihat dari regulasi dan pembentukan tatanan baru politik yang menciptakan pola hubungan yang terbuka antara elite, partai politik, dan kelompok-kelompok kepentingan. Contoh yang paling mudah untuk menggambarkan hal tersebut adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (UU Partai Politik) dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Kedua Undang-undang tersebut memberikan ruang yang menjadi ajang kompetitif bagi sirkulasi elite (Amirs 2003:6).

Dengan adanya UU Pemilu dan Partai Politik yang baru, siapa pun bisa mengkases sistem politik yang ada. Hal tersebut dilakukan dengan cara yang diatur mekanismenya, seperti melalui partai atau parlemen. Ajang yang kompetitif ini menandakan tidak adanya kesempatan untuk membentuk suatu kekuasaan yang bersifat tunggal seperti era Orde Baru.

Pada era reformasi, struktur politiknya tidak lagi represif demi mempertahankan hegemoni penguasa tunggal di level negara. Hal tersebut berkaitan dengan salah satu dimensi yang disebutkan oleh McAdam (1996), yaitu bahwa dalam melihat apakah struktur bisa menjadi kesempatan atau tidak bagi sebuah gerakan sosial adalah dengan melihat ada atau tidaknya represi dari pemerintah. Hal ini berbeda dengan era Orde Baru; pemerintah kala itu sangat represif demi menjaga kestabilan politik untuk mendukung stabilitas ekonomi. Banyak terjadi penangkapan terhadap mereka yang dianggap terlalu “mengancam” negara. Hal tersebut sudah tidak ditemukan lagi pada era reformasi. Pada era ini, siapa pun bebas mengekspresikan dirinya,

berkumpul, berpendapat, melakukan demonstrasi, mengkritik pemerintah, tanpa harus takut dengan tindakan represif pemerintah.

Gerakan dakwah salafi memanfaatkan kondisi kesempatan politik ini untuk bisa berkembang. Pada era reformasi, salafi bebas melakukan kegiatan ekspansi dakwahnya melalui berbagai media yang mereka miliki tanpa takut adanya represi dari penguasa. Upaya ekspansi ini juga didukung oleh kondisis struktural yang memberikan kesempatan gerakan untuk berkembang, dengan bermunculannya aktor-aktor gerakan (ustadz) yang mulai menyampaikan ide-ide gerakan. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya, pada era Orde Baru, masih menjalani pendidikan di Timur Tengah, LIPIA, atau beberapa pesantren (salafi) di tanah air.

Hal yang penting untuk dicatat terkait dengan struktur kesempatan politik adalah ia bukanlah suatu determinan bagi sebuah gerakan sosial. Struktur kesempatan politik hanya semacam medium untuk sebuah gerakan dapat berkembang. Hal ini dikarenakan sebelum adanya kesempatan politik, gerakan sosial sudah ada dan mereka sudah memiliki basis gerakan, tujuan, dan strategi. Sebagai contoh, aktivisme Islam yang disruptif yang merupakan cerminan gerakan Islam, sudah muncul pada era Soeharto. Jadi, di tengah kungkungan rezim yang represif, gerakan Islam bukan tidak ada, tetapi mengendap dengan strategi melakukan gerakan bawah tanah.

Demikian juga dengan salafi, struktur dan kesempatan politik sebenarnya bukan menjadi penentu kemunculan salafi di Indonesia. Ini karena salafi telah memiliki gagasan dan cita-cita jauh sebelum kesempatan politik ada. Struktur kesempatan politik itu sendiri hanya sebagai sebuah medium yang memberikan kesempatan bagi salafi—dan juga gerakan lain tentunya— untuk berkembang dan melakukan ekspansi yang sebelumnya tidak bisa dilakukan saat berada pada *closed system*, saat struktur politik tak memberikan kesempatan untuk berkembang.

## PENGEMASAN IDEOLOGI DALAM GERAKAN SALAFI

Selain kesempatan politik, perkembangan sebuah gerakan juga ditunjang oleh apa yang disebut oleh Benford dan Snow (2000) sebagai *framing* (pembingkaihan). Ini merujuk pada fenomena aktif dan berproses yang melibatkan agen dalam mengonstruksi realitas. Kerangka konsep ini berasal dari gagasan Goffman (1974) mengenai

*frame*, yaitu sebuah skema interpretasi yang memungkinkan individu untuk memetakan, memahami, mengidentifikasi, serta memberikan label terhadap setiap kejadian yang muncul dalam kehidupan mereka dan dunia secara umum (Benford dan Snow 2000; Snow 2004).

Salafi sebagai sebuah gerakan sosial memiliki *framing* dalam pengemasan ideologinya. *Framing* juga sekaligus menjadi penanda bagi aktivitas-aktivitas para aktor gerakan dakwah salafi. Penulis mencoba menjelaskan tahapan *framing* dari gerakan dakwah salafi di Indonesia. Dalam hal *diagnostic framing*, bagi gerakan dakwah salafi, umat Islam saat ini tengah mengalami kemunduran setelah masa kejayaan di zaman Nabi dan generasi Sahabat. Bagi mereka, saat ini orang-orang kafir selalu berkumpul dan mengajak untuk senantiasa membuat konspirasi jahat terhadap Islam. Orang-orang kafir berusaha menguasai tanah-tanah kaum muslimin yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Mereka memakan, mencuri, dan meraup kekayaan kaum muslimin dengan rakus tanpa ada yang bisa mencegahnya. Hal ini menunjukkan bangsa-bangsa kafir tidak takut lagi kepada kaum muslimin karena kaum muslimin telah hilang wibawanya dan sudah terjangkiti penyakit *al wahn* (Jawas 2008:3-5).

Pangkal yang menjadi penyebab runtuhnya kewibawaan dan hinggapnya penyakit *al wahn* ialah telah jauhnya umat Islam dari pemahaman Islam dalam Alquran dan Sunnah yang sejalan dengan pemahaman para Sahabat. Kondisi ini tercermin dari banyaknya kaum muslimin yang menyimpang dari *akidah* yang benar, terjerumus pada aliran-aliran sesat yang membuat mereka terpecah-belah, dan menyimpang dari Sunnah (melakukan *bid'ah*). Hal-hal tersebutlah yang menjadi sumber dari masalah-masalah yang dialami umat Islam atau kemunduran-kemunduran yang menempatkan Islam dalam posisinya yang terpuruk pada zaman ini. Keadaan inilah yang menjadi titik-tolak semangat dakwah salafi.

Setelah mengartikulasikan kondisi-kondisi kekinian yang dialami oleh umat Islam, gerakan dakwah salafi merumuskan solusi untuk mengembalikan kejayaan umat. Hal itu dirumuskan dengan sangat sederhana, yakni kembali kepada Al-quran dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman para sahabat. Jalan menuju kejayaan itu adalah menegakkan kalimat *tauhid* dan menyingkirkan kesyirikan, seperti yang diungkapkan oleh Yazid Jawas (2008:10):

“Jalan menuju keselamatan dan kejayaan umat Islam adalah telah dijelaskan di dalam Alquran dan Sunnah yaitu dengan menauhidkan Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan dan menghidupkan Sunnah dan menjauhkan *bid'ah*, melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan menjauhi larangan-larangan-Nya.”

Solusi utama yang diberikan oleh gerakan dakwah salafi adalah menegakkan kalimat *tauhid*. Kemuduran dan keterpurukan umat Islam harus dicarikan solusinya. Alquran dan Sunnah Nabi telah memberikan jawaban tersebut. Kaum salafi meyakini bahwa dengan kembali kepada *tauhid* yang lurus, maka Islam akan menggapai kejayaan seperti yang pernah dicapai oleh para pendahulu mereka, yakni umat Islam pada generasi setelah Muhammad: para Sahabat.

Bagi salafi, masa keemasan dan kejayaan Islam adalah generasi para sahabat<sup>4</sup>. Pada masa tersebut Islam tegak di muka bumi dan menguasai hampir dua per tiga dunia. Kemakmuran dan keadilan pun tegak bersama tegaknya harga diri dan kewibawaan. Oleh karena itu, gerakan dakwah salafi menyebutkan pentingnya menyandarkan pemahaman tentang Alquran dan Sunnah kepada pemahaman para sahabat. Salah satu kunci kejayaan adalah memahami Islam sesuai dengan apa yang dipahami para Sahabat. Inilah yang disebut sebagai *prognostic framing*, upaya artikulasi solusi bagi permasalahan yang ada.

Setelah melalui tahap *diagnostic* dan *prognostic*, proses *framing* juga melibatkan tahap yang disebut sebagai *motivational framing*. Ia adalah suatu elaborasi panggilan untuk bergerak yang menjadi dasar untuk terlibat dalam usaha memperbaiki keadaan melalui tindakan kolektif. Tahap ini merupakan tangga menuju tercapainya sebuah cita-cita gerakan. Aktivitas ini adalah aksi yang melampaui diagnosis dan prognosis sebelumnya.

Salafi dengan konstruksi atas permasalahan yang ada dan artikulasi solusi yang ditawarkan memulai aktivitas kolektifnya dengan menggelar pengajian, penerbitan buku, pendirian pesantren, dan stasiun radio. Aktivitas-aktivitas tersebut tentunya berjalan dengan *framing* yang telah dilakukan, sehingga konten-konten pada

---

<sup>4</sup> Sahabat dalam terminologi gerakan dakwah salafi adalah orang-orang Islam yang hidup bersama Nabi atau pernah melihat Nabi. Umumnya generasi Sahabat merujuk pada generasi Khulafa Ar Rasyidin, yakni masa kepemimpinan Abu Bakar As Shiddiq, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘anhuma

tiap aktivitas berusaha menawarkan *tauhid* dan pemahaman agama yang sesuai dengan Sahabat Nabi, yang menjadi kunci dari kejayaan dan keselamatan di dunia.

Dengan demikian, proses *framing* ini sebenarnya menghasilkan beberapa hal. Pertama, ia memberikan batasan ideologi sebuah gerakan serta pengemasannya guna bisa diterima atau didukung khalayak. Kedua, ia menjadi acuan cara bertindak atau *guideline* bagi para aktor untuk melakukan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan. Hal ini tergambar dari para aktor salafi yang mengembangkan radio, majalah, dan pengajian yang sesuai dengan apa yang disampaikan dalam artikulasi problematika umat dan solusinya.

### MOBILISASI DANA UNTUK DAKWAH

Telah kita ketahui bahwa uang adalah sumber daya paling penting bagi sebuah gerakan. Seberapa besar pun sumber daya lain yang dimiliki, aktivitas gerakan tak akan bisa berjalan kalau tidak ada yang membiayai (Edwards dan McCarthy 2004:128). Dalam menjalankan aksinya, setiap gerakan hampir dapat dipastikan memerlukan biaya. Karenanya, masing-masing gerakan berupaya semaksimal mungkin mencari cara untuk mengakses sumber-sumber dana.

Edwards dan McCarthy (2004) melihat bahwa sebagian gerakan mengakses dan melakukan redistribusi sumber daya dengan mendirikan yayasan (*foundation*). Hal tersebut selain untuk mendapatkan legitimasi, dalam tingkat tertentu juga dijadikan wahana untuk menyelenggarakan aktivitas gerakan, termasuk pendanaan. Dengan adanya organisasi yang jelas seperti yayasan, gerakan mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan dana. Hal itu pulalah yang dilakukan gerakan dakwah salafi.

Sekitar tahun 1990-an, gerakan dakwah salafi mulai membangun kegiatannya dengan mendirikan yayasan-yayasan yang mendapat dukungan dana dari Arab Saudi, Kuwait, dan beberapa negara Teluk lainnya. Salah satu yayasan yang didirikan oleh gerakan ini adalah Yayasan As-Sunnah pada tahun 1992. Ini merupakan yayasan pertama yang didirikan oleh gerakan dakwah salafi (Hasan 2008:127-130). Yayasan yang didirikan oleh Abu Nida ini bertujuan untuk menyebarkan pemahaman salafi dengan menggelar *daurah* (pengajian) untuk para mahasiswa di wilayah Jawa Tengah.

**Tabel 1** Daftar Beberapa Yayasan Salafi<sup>5</sup>

Nama Yayasan	Tempat	Kegiatan	Sumber Dana
Majelis Ihya Turats al Islami	Yogyakarta	Pendidikan pesantren, daurah dan halaqah	<i>Jam'iyat Ihya' al Turats al Islami</i>
Yayasan Al Shofwa	Jakarta	Penerbitan buku, daurah dan halaqah, program pelatihan da'i, penyebaran buku-buku, dan juga menjadi penghubung kepada Jam'iyat Ihya' al Turats al Islami	<i>Jam'iyat Ihya' al Turats al Islami dan Mu'assasat al Haramayn</i>
Lajnah al-Khairiyah al Musyarakah	Jakarta	Menyalurkan bantuan dana dengan mensponsori pembangunan-pembangunan masjid, dan kegiatan dakwah lainnya (menjadi penghubung/wakil Ihya' Turats di Indonesia)	<i>Jam'iyat Ihya' al Turats al Islami</i>
Yayasan Imam al Bukhori	Solo	Berfokus pada pendidikan pesantren melalui kompleks Perguruan Imam Bukhari	<i>Jam'iyat Ihya' al Turats al Islami</i>
Yayasan Nurusunnah	Semarang	Kegiatan dakwah halaqah dan daurah	<i>Jam'iyat Ihya' al Turats al Islami</i>
Wahdah Islamiyah	Sulawesi Selatan	Mengembangkan sejumlah lembaga pendidikan dalam berbagai tingkatan: TK, SDI, SMI, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab	<i>Jam'iyat Ihya' al Turats al Islami dan Mu'assasat al Haramayn</i>
Yayasan Cahaya Ilmu	Jakarta	Pendidikan pesantren dan Sekolah dari SD sampai SMA serta penerbitan buku-buku Islam	<i>Jam'iyat Ihya' al Turats al Islami</i>
Yayasan Al Huda	Bogor	Menjadi sponsor pendirian masjid dan pengembangan kegiatan-kegiatan dakwah, TK, tahfidz al Quran	<i>Organisasi Amal Islam Internasional</i>

Sumber: Hasan (2008), Rahmat (2005) dan dokumen pribadi, diolah kembali.

Apa yang dilakukan oleh Abu Nida, dengan mengembangkan pengajian-pengajian salafi ketika itu, mengundang lembaga donor dari Timur Tengah untuk memberikan bantuan dana. Tercatat setidaknya tiga lembaga dari Timur Tengah yang kemudian memberikan dukungan bagi perkembangan dakwah salafi di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut antara lain *Jam'iyat Ihya' al Turath al Islami* atau yang biasa disebut *Ihya' Turats*, sebuah lembaga internasional yang berkedudukan di Kuwait. Secara khusus lembaga

<sup>5</sup> Data yang dimuat dalam tabel ini hanya sebagian kecil saja dari yayasan-yayasan yang dimiliki gerakan salafi di Indonesia. Tentu jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang dipaparkan tabel itu. Tetapi melalui tabel tersebut, paling tidak terlihat kekuatan jaringan yang dimiliki salafi untuk memobilisasi sumber dana melalui pendirian yayasan yang didukung oleh lembaga-lembaga dari Timur Tengah.

ini berada dalam pengawasan pemerintah Kuwait dan didukung oleh otoritas keagamaan Arab Saudi (Hasan 2008:71).

Kedua, lembaga *Mu'assasat al Haramayn*, sebuah lembaga yang berbasis di Arab Saudi dan didukung penuh oleh otoritas keagamaan di sana. Lembaga ini bekerja langsung di bawah pengawasan Kementerian Masalah-masalah Islam, Sumbangan, Dakwah, dan Bimbingan. Didirikan tahun 1980, lembaga ini mempunyai misi menerapkan ajaran Islam yang benar serta mendidik generasi-generasi baru. Lembaga ini juga memberikan bantuan dana untuk pendirian masjid dan kegiatan-kegiatan dakwah lainnya (Hasan 2008:70-71).

Ketiga adalah Organisasi Amal Islam Internasional, sebuah lembaga yang berkedudukan di Dammam, Arab Saudi, yang berfokus memberikan bantuan sosial dan keagamaan. Lembaga ini memberikan bantuan untuk mendirikan masjid melalui beberapa yayasan di Indonesia, seperti Yayasan Al Huda di Bogor, yang telah menerima bantuan untuk mendirikan masjid dari lembaga tersebut. Untuk mendapatkan bantuan dana, ada persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain tidak boleh ada peribadatan yang tidak sesuai dengan Alquran dan Sunnah serta harus menerima ustadz dan imam masjid yang sudah ditentukan. Dengan syarat tersebut, ajaran salafi dengan mudah disebar (Rahmat 2005:130).

Yayasan-yayasan yang didirikan oleh gerakan salafi jumlahnya begitu banyak seiring dengan perkembangan gerakan. Yayasan tersebut menggunakan jaringan informal untuk mendapatkan akses kepada tiga lembaga internasional tersebut. Yayasan-yayasan yang didirikan pun belakangan bukan hanya di Yogyakarta, Bogor, dan Jakarta, tetapi telah menyebar luas di beberapa wilayah di Indonesia (lihat Tabel 1).

Dari berbagai yayasan yang didirikan oleh gerakan dakwah salafi, peneliti melihat adanya jaringan informal yang menghubungkan berdirinya satu yayasan dengan yayasan lain. Para aktor salafi mendirikan yayasan serta mengembangkan kegiatannya menggunakan jaringan yang mereka miliki. Jaringan tersebut bersifat informal dan terbangun di antara kader-kader Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan para lulusan Timur Tengah. Kebanyakan yayasan didirikan oleh para lulusan Timur Tengah, terutama dari

Universitas Islam Madinah dan Universitas Islam di Riyadh. Selain itu untuk memuluskan kegiatannya mereka juga memanfaatkan jaringan DDII.<sup>6</sup>

Data di atas merupakan indikasi bahwa jaringan sosial memiliki posisi sentral dalam sebuah gerakan. Selain untuk mendukung tindakan kolektif, hal itu juga merupakan bagian dari sumber daya gerakan. Porta dan Diani (2006:115) menyebutkan bahwa jaringan sosial merupakan fasilitator bagi berlangsungnya tindakan kolektif. Jaringan sosial juga menjadi bagian penting untuk menjaring partisipasi banyak aktor agar terlibat dalam tindakan kolektif. Dengan jaringan yang dimiliki oleh masing-masing individu, sebuah gerakan dapat dipastikan memiliki jangkauan ekspansi yang lebih luas.

Hal tersebutlah yang kemudian terjadi pada gerakan dakwah salafi. Jaringan sosial yang menopang ideologi gerakan memberikan dua hal sekaligus. Pertama, fasilitator dalam melakukan tindakan kolektif mendapatkan dukungan dana untuk mendirikan pesantren, masjid, dan lembaga penerbitan buku, kemudian mengelolanya. Kedua, secara tidak langsung jaringan sosial tersebut memperbesar jangkauan ekspansi gerakan salafi. Kecenderungan demikian nampak terlihat dari upaya-upaya gerakan dakwah salafi untuk mengakses sumber daya dan memobilisasinya.

## PENUTUP

Salafi sebagai sebuah gerakan memiliki kapasitas ide dan gagasan yang menjadi penuntun dalam setiap tindakan. Ide mengenai “Islam murni” senantiasa dikampanyekan sebagai bagian dari tujuan gerakan untuk bisa menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi dan para Sahabatnya. Dengan ditopang oleh organisasi dalam bentuk yayasan-yayasan, tiap-tiap elemen dalam gerakan ini menunjukkan adanya sebuah otonomi. Tidak ada sebuah jenjang hirarki yang mengatur organisasi gerakan.

Pengalaman pada era Orde Baru, era saat tertutupnya sistem politik, menunjukkan kapasitas nilai dan ide yang dipegang oleh para aktor salafi. Pada era Orde Baru yang sangat represif, salafi

---

<sup>6</sup> Hal tersebut memang bukan hal yang baru, mengingat mayoritas aktor gerakan salafi yang bisa menempuh pendidikan di Arab Saudi biasanya merupakan kader DDII dan mendapatkan rekomendasi untuk bersekolah di sana dari lembaga tersebut.

sebagaimana gerakan Islam lainnya, hanya bersifat disruptif. Ia hanya dilokalisasi di masjid-masjid kampus dan tidak dapat menyampaikan gagasannya secara bebas. Hal ini menunjukkan betapa tinggi komitmen mereka terhadap nilai dan gagasan yang mereka perjuangkan.

Pada era reformasi, salafi menyebarkan ide, gagasan, dan ideologinya secara bebas kepada khalayak. Meski demikian, struktur dan kesempatan politik pada era tersebut bukanlah penentu dari kemunculan gerakan ini sebab gagasan tentang perubahan dan cita-cita kembali kepada Islam secara murni telah ada dan diperjuangkan sejak Orde Baru, bahkan jauh sebelumnya. Struktur dan kesempatan politik yang lahir dari reformasi ibarat sebuah ruang yang lebih terbuka, yang memberikan kesempatan lebih kepada salafi untuk berkembang.

Perkembangan gerakan dakwah salafi pada era reformasi ini juga secara penuh ditopang oleh jaringan sosial yang dibangun sejak Orde Baru. Jaringan ini memberikan dukungan berupa pendidikan baik di dalam negeri, yakni di LIPIA, maupun di Arab Saudi, yakni di Universitas Islam Madinah atau Universitas Muhammad bin Su'ud, Riyadh. Upaya ini berhasil dengan lahirnya tokoh-tokoh salafi yang menyokong perkembangan gerakan dakwah Salafi pada era reformasi.

Selain itu, jaringan sosial yang dibangun juga memberikan dukungan dana sebagai sumber daya terpenting gerakan untuk dimobilisasi. Dukungan dana dari lembaga-lembaga internasional, terutama Arab Saudi dan Kuwait, membantu gerakan dakwah Salafi untuk bisa mendirikan masjid, sekolah, pesantren, dan melakukan berbagai kegiatan dakwah lainnya. Keadaan tersebut secara tidak langsung membantu kelompok ini untuk terus berkembang. Pada titik ini terlihat bahwa jaringan sosial memiliki peran strategis bukan hanya sebagai sebuah fasilitator bagi gerakan dakwah salafi untuk mengakses sumber daya strategis, tapi juga secara tidak langsung memberikan dampak bagi ekspansi gerakan dakwah salafi.

Ekspansi dakwah salafi juga didukung oleh pengemasan ideologi yang baik. Pengemasan ini sangat berguna agar ide-ide dan tujuan gerakan salafi bisa diterima oleh masyarakat. Pengemasan ideologi yang dimaksud adalah *framing* bahwa *manhaj* salafi adalah sebuah jalan keselamatan dan kejayaan dari segala keterpurukan yang menimpa umat Islam. Pembingkaiannya semacam ini diwujudkan ke

dalam bentuk-bentuk tindakan secara kolektif, seperti pengajian, mendirikan stasiun radio, serta menerbitkan buku dan majalah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. 1999. *Islam Reformis Dinamika Intelektual dan Gerakan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Armstrong, Elizabeth dan Mary Bernstern. 2006. "Culture, Power, and Institutions: A Multi-Institutional Politics Approach to Social Movements" dalam *Sociological Theory* 1: 74-94
- Hasan, Noorhaidi. 2008. *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde-Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Jahroni, Jajang. 2007. "The Salafi Movement in Indonesia: From Muhammadiyah to Laskar Jihad" dalam *Jurnal CSIS Islamic Thought and Movements in Contemporary Indonesia*. Editor: Rizal Sukma dan Clara Joewono.
- Jawas, Yazid Abdul Qadir. 2008. *Mulia dengan Manhaj Salaf*. Bogor: Pustaka At Takwa.
- Kriesi, Hanspeter. 2004. "Political Context and Opportunity." Hlm. 68-90 dalam *The Blackwell Companion to Social Movements*, diedit oleh Snow, D. A., S.A Soule, dan H. Kriesi. Massachusets: Blackwell Publishing.
- McCarthy, John D. dan Mayer N. Zald. 1977. "Resource Mobilization and Social Movement: A Partial Theory," dalam *American Journal of Sociology* 6: 1212-1241
- Muhtadi, Burhanudin. "Demokrasi Zonder Toleransi: Potret Islam Pasca Orde Baru." Makalah yang dipresentasikan pada diskusi "Agama dan Sekularisme di Ruang Publik: Pengalaman Indonesia" oleh Komunitas Salihara, di Jakarta, Januari 2011.
- Neuwman, Lawrence. 2003. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson Education Inc.
- Opp, Karl Dieter. 2009. *Theories of Political Protest and Social Movements: a Multidisciplinary Introduction, Critique, and Synthesis*. London: Routledge.
- Oliver, Pamela E. dan David J. Myers. "Diffusion Models of Cycles of Protest as a Theory of Social Movements." Makalah yang dipresentasikan pada *Congress of the International Sociological Association* di Montreal, Juli 1998.

- Porta, Donatella dan Mario Diani. 2006. *Social Movement, an Introduction (2<sup>nd</sup>ed.)*. Victoria, Malden, Oxford: Blackwell Publishing.
- Rahmat, Imdadun M. 2005. *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Benford, Robert dan David Snow. 2000. "Framing Process and Social Movements: An Overview and Assesment" dalam *Annual Review of Sociology* 26: 611-39
- Snow, David. 2004. "Framing Process, Ideology and Discursive Fields." Hlm. 381-412 dalam *The Blackwell Companion to Social Movements*, diedit oleh Snow, D. A., S.A Soule, dan H. Kriesi. Massachusets: Blackwell Publishing.
- Tilly, Charles. 1998. "Social Movements and (All Sorts of) Other Political Interactions - Local, National, and International - Including Identities" dalam *Theory and Society*, Vol. 27, No. 4, Special Issue on Interpreting Historical Change at the End of the Twentieth Century. (Aug., 1998), pp. 453-480.